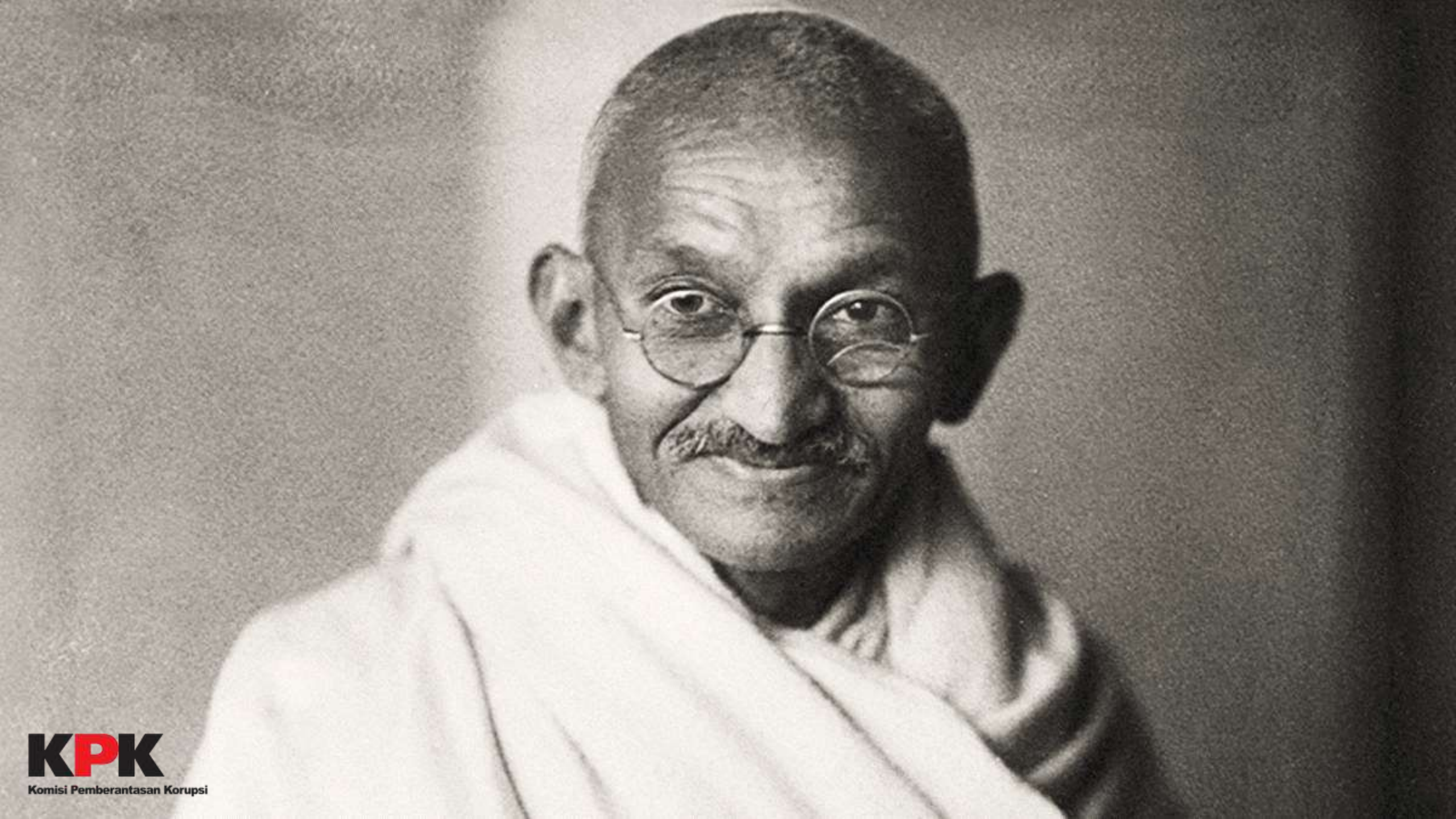

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

MEMIMPIN

DALAM

KESEDERHANAAN

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

Personal leadership

Tantangan

KPK

Realis..

Generasi Muda Koruptor

- Fahd El Fouz (29 tahun)

- Wa Ode Nurhayati (30 tahun)

- M. Faisal Azwan (31 tahun)

- Eka Dharma Putra (32 tahun)

- Muhammad Nazarudin (33 tahun)

- Agung Purno Sarjono (35 tahun)

Penindakan → Takut Korupsi

Pencegahan → Tidak Bisa Korupsi

Pendidikan & Peran serta Masyarakat → Tidak ingin korupsi

Kelengkapan dan kecukupan hukum

Komitmen Politik dan Pimpinan

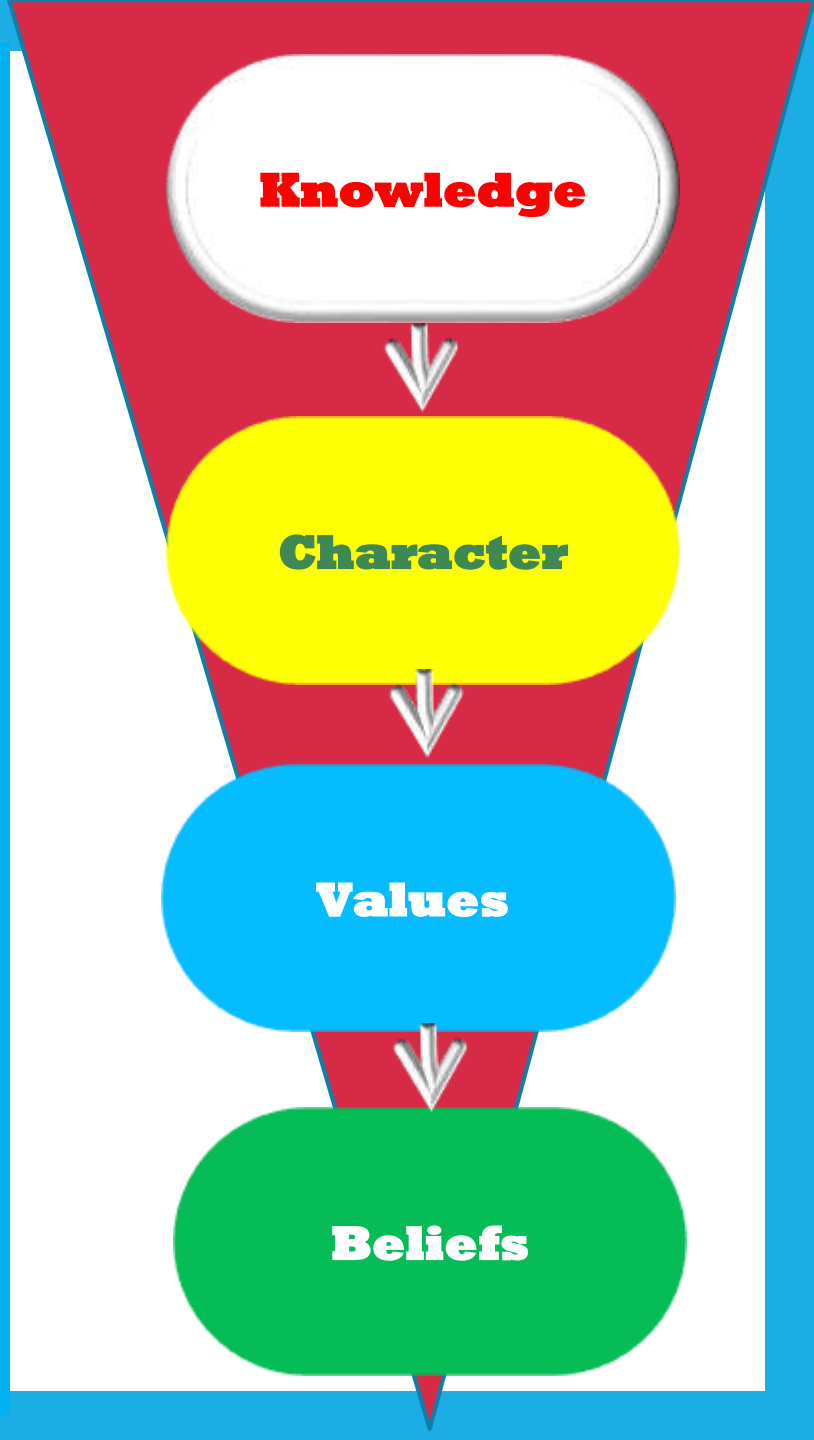

Sasaran Strategis Direktorat Dikyanmas

Dalam Business Process (berdasarkan Pasal 13 UU No 30 Tahun 2002)

Pencegahan Korupsi Melalui

PENDIDIKAN

Antikorupsi

Pencegahan Korupsi Melalui

KAMPANYE

Antikorupsi

Pencegahan Korupsi Melalui

SOSIALISASI

Antikorupsi

Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat

Mendidik dan Mengkampanyekan Nilai Antikorupsi serta Meningkatkan Peran Serta Masyarakat

DIKYANMAS

Satgas Pendidikan

IPK
Idealis - Pelopor - Konsisten

1. Insersi nilai integritas ke dalam Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) atau Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) di Perguruan Tinggi
2. Insersi materi anti korupsi pada pendidikan dasar dan menengah
3. Panduan Tata Kelola Sekolah dan Kampus Berintegritas

Satgas Comdev

COMMUNITY DEVELOPMENT

Aksi pelibatan komunitas untuk mengawal dan mengadvokasi pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan dana desa.

Satgas Politik

POLITIK CERDAS BERINTEGRITAS

Sistem Integritas Partai Politik:

1. Keuangan partai,
2. Implementasi kode etik
3. Kaderisasi Partai yang terbuka
4. Rekrutmen kader yang berintegritas
5. Demokrasi Internal Partai Politik

Satgas Swasta

PROFIT
profesional berintegritas

1. Penyusunan Panduan Pencegahan Korupsi untuk Dunia Usaha
2. Komite Advokasi Nasional di 5 Sektor (Kesehatan, Infrastruktur, Hulu Migas, Kehutanan, Pangan)
3. Komite Advokasi Daerah di tingkat Provinsi
4. Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, ISO370001
5. Ahli Pembangun Integritas (*Certified Integrity Officer*)

Satgas Media & Kampanye

BERANI JUJUR HEBAT!

1. Kampanye melalui berbagai media online dan offline
2. Kerjasama dengan TVRI dan RRI terkait penyiaran program
3. Kerjasama dengan PT KAI, Garuda Indonesia, Angkasa Pura, BPJS Ketenagakerjaan terkait penayangan Iklan Layanan Masyarakat dan Produk Kampanye lain
4. Anti-Corruption Film Festival
5. *Roadshow* Bus KPK Jelajah Negeri

jaga

Platform JAGA didesain untuk menyambungkan pelbagai data & informasi yang berguna untuk masyarakat melakukan control pengawasan terhadap kinerja pemerintahan

JAGA Sekolahku
JAGA Rumahsakitku
JAGA Puskesmasku
JAGA Perijinanku
JAGA Desaku

Dengan dukungan:

KORSUPGAH
KOORDINASI DAN SUPERVISI

ACCH
Anti-Corruption Clearing House

LSP - KPK
Lembaga Sertifikasi Profesi Komisi Pemberantasan Korupsi

Pusat Edukasi Antikorupsi
Cipta • Karya • Berdaya

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 13 huruf C UU KPK:
“Pendidikan AnY Korupsi di seYap jenjang pendidikan”

Pendidikan Anak Usia Dini / Berbasis Keluarga

Pendidikan Dasar / Menengah

Pendidikan Tinggi/ Sekolah Kedinasan

Masyarakat Umum (Swasta, APH, K/L/O/ P, CSO, Komunitas, Sektor politik, dll)

Indeks Persepsi Korupsi (CPI)

Mengukur persepsi korupsi secara global di sektor publik yang dilakukan oleh pejabat negara dan politisi

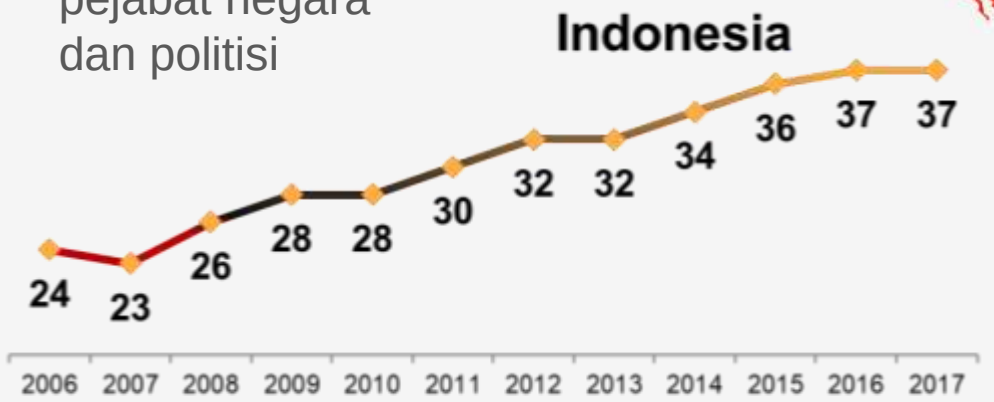

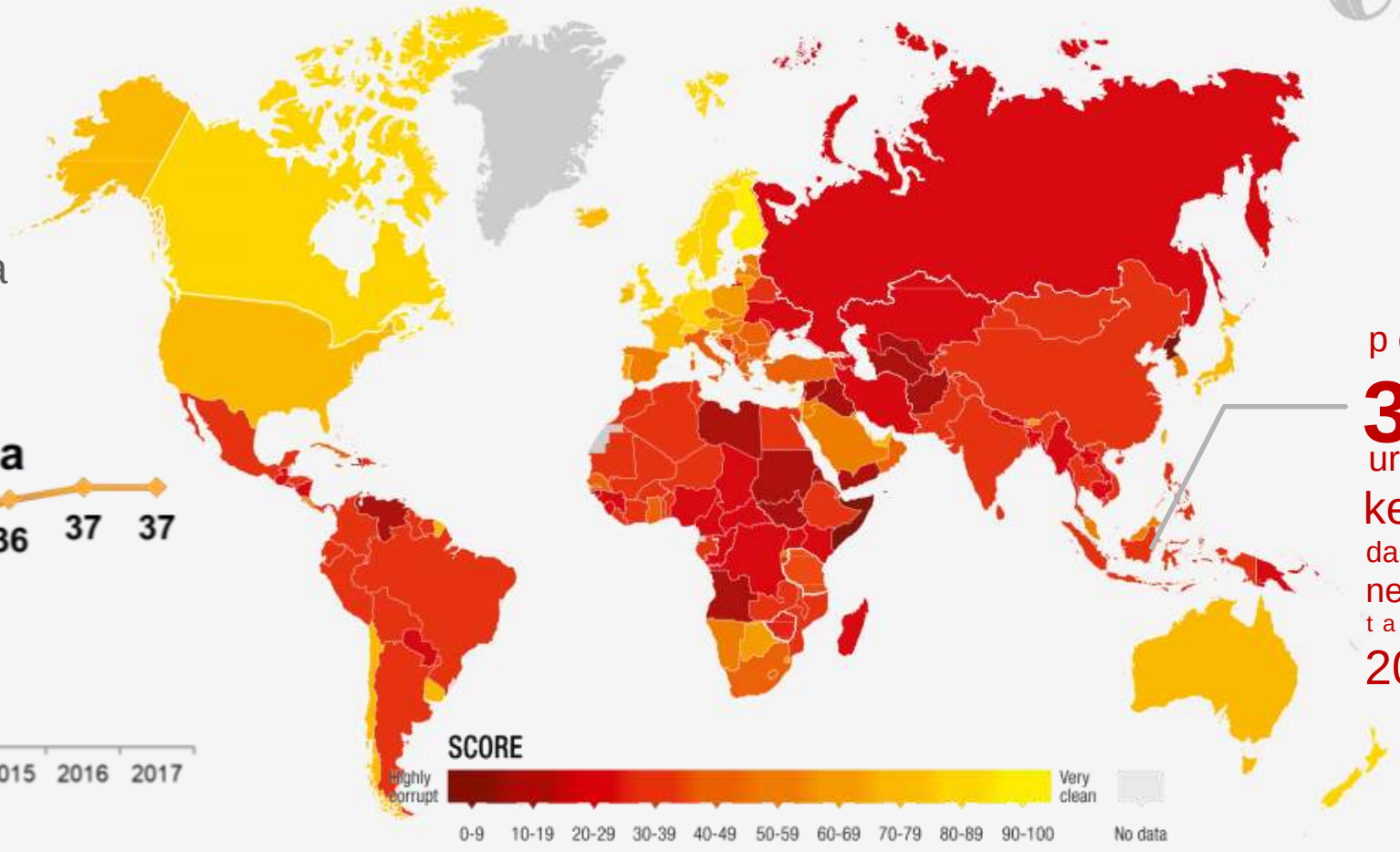

poin
37
urutan
ke **96**
dari **180**
negara
tahun
2017

5 Negara dengan nilai IPK tertinggi

89	88	85	85	85
Selandia Baru	Denmark	Finlandia	Norwegia	Swiss

Rata-rata nilai IPK negara ASEAN

47	84	37	34
Malaysia	Singapura	Thailand	Filipina

Similar with Indonesia's CPI 2017

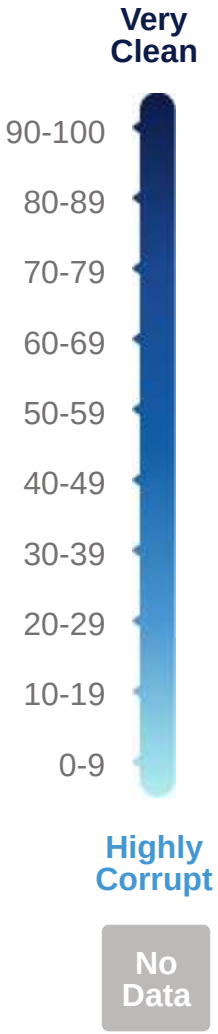

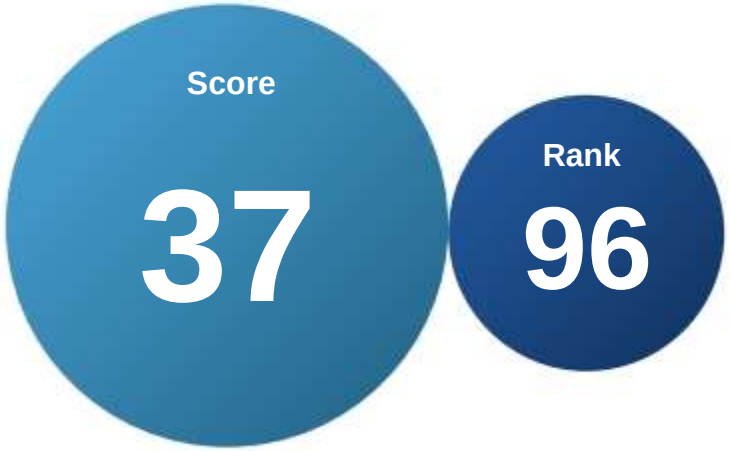

Brazil

Colombia

Indonesia

Panama

Peru

Thailand

Zambia

ASEAN CPI

Rank	CPI 2017	Country	CPI 2016	
6	84	Singapore	84	→
32	62	Brunei Darussalam	58	↑
62	47	Malaysia	49	↓
91	38	Timor Leste	35	↑
96	37	Indonesia	37	→
96	37	Thailand	35	↑
107	35	Vietnam	33	↑
111	34	Philippines	35	↓
130	30	Myanmar	28	↑
135	29	Laos	30	↓
161	21	Cambodia	21	→

Corruption Perception Index

stable trend and continue increasing

KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

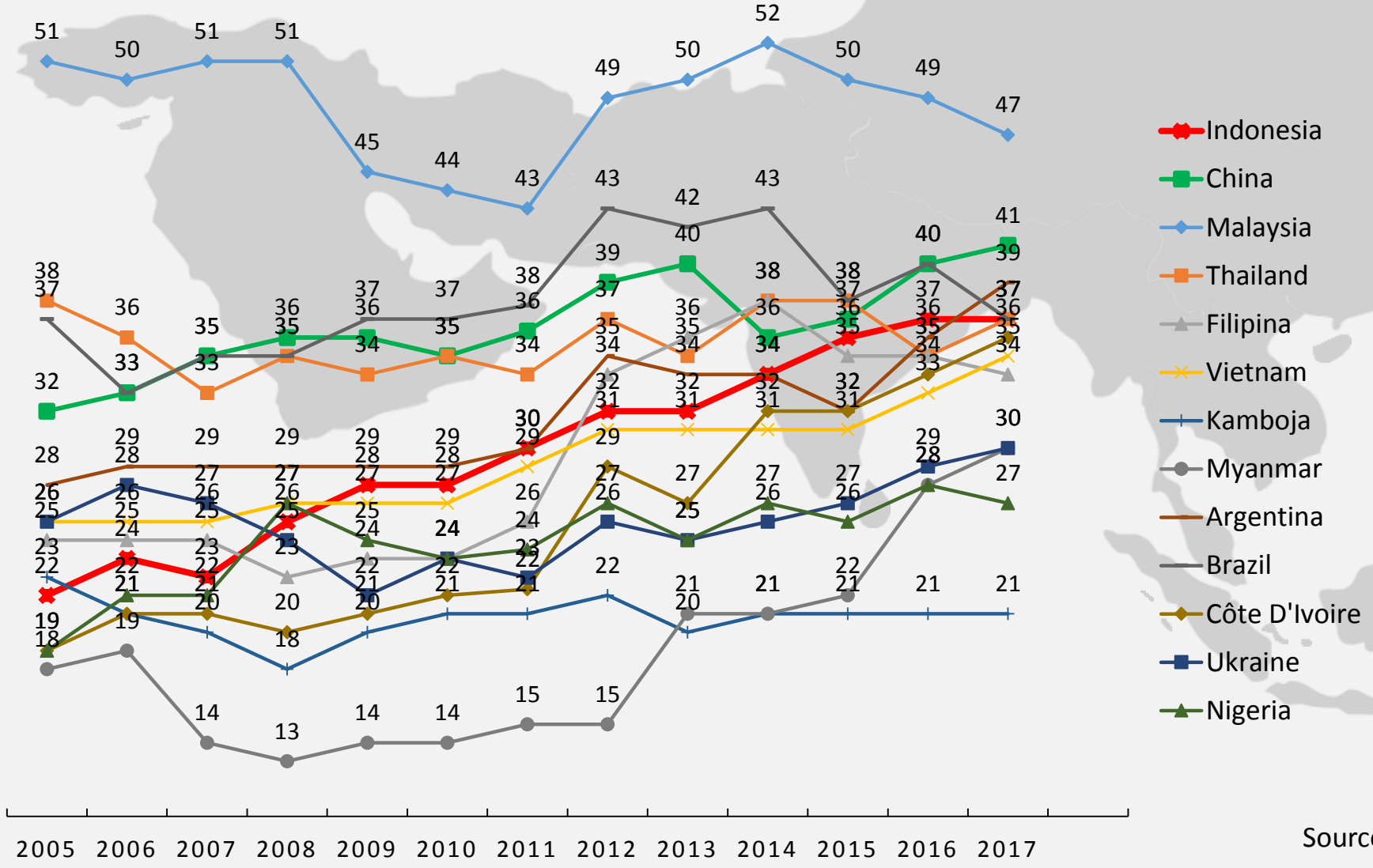

Score Improvement 1999 - 2017

Indonesia	: 20
China	: 7
Malaysia	: - 4
Thailand	: 5
Phillipines	: - 2
Vietnam	: 9
Cambodia	: 0
Argentina	: 9
Brazil	: - 4
Ukraine	: 4
Nigeria	: 11

Source : hhtp://www.transparency.org/research/cpi

CPI | CORRUPTION PERCEPTION INDEX

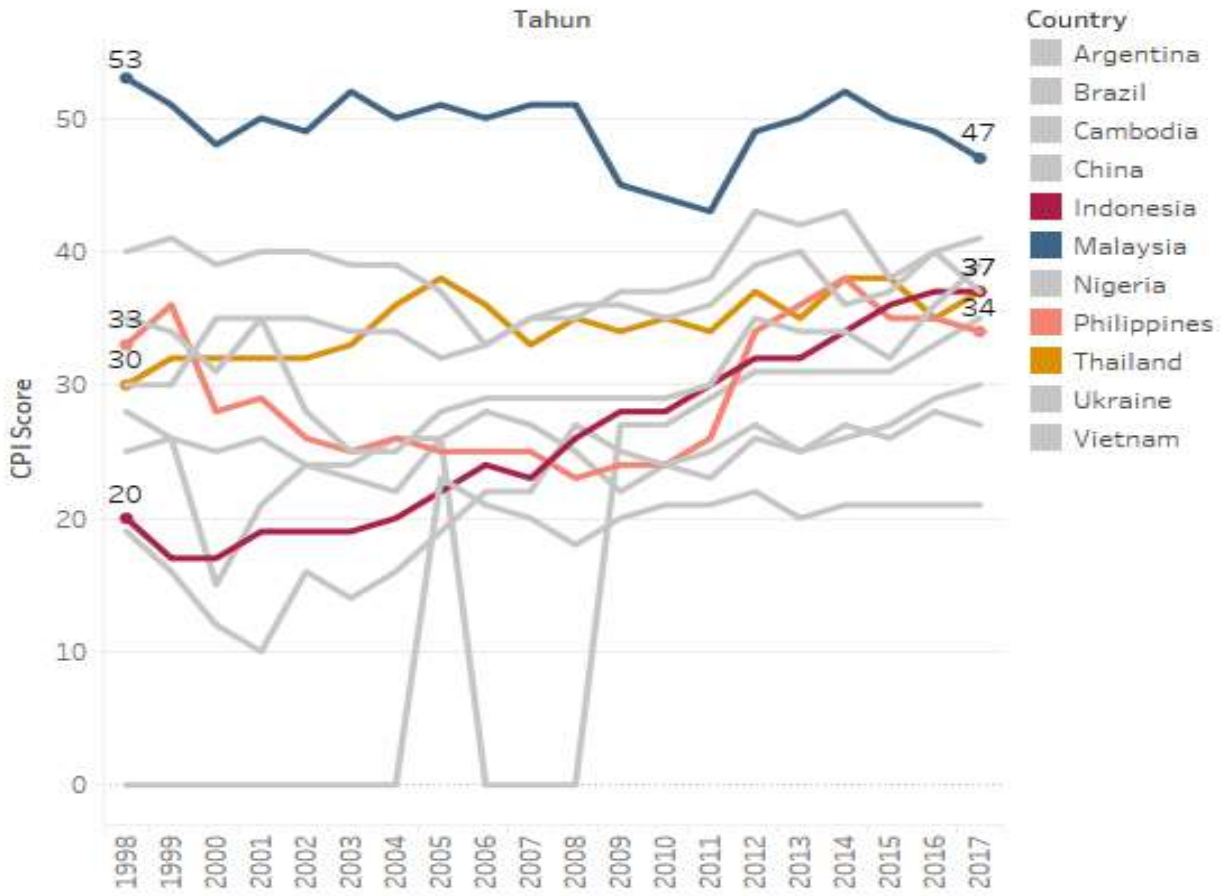

PENINGKATAN 1998-2017:

Indonesia : 17
Vietnam : 10
Argentina : 9
Nigeria : 8
Thailand : 7
China : 6
Ukraine : 2
Philippine : 1
Cambodia : -2 (2005-2017)
Brazil : -3
Malaysia : -6

Source: https://transparency.org/research/cpi

CPI SCORE 37

37

Economist Intelligence Unit/EIU
(Country Risk Rating):

41

IMD world Competitiveness:

35

Global Insight (Country Risk Rating)

- Eksistensi Suap dan Korupsi

37

Bertlesmann Transformation Index:

World Justice Project: 20

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum *(rule of law)*
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutf, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

PERC: 32

- Persepsi korupsi sektor publik :
  a. Pimpinan politik nasional dan lokal
  b. PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

50

World Economic Forum – Executive Opinion Survey:

30

Varities Democracy Project (baru di 2017)

- Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara : electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual

50

International Country Risk Guide:

JAGA Versi 5.0

COMING SOON

Akses informasi serba-serbi pelayanan publik dan praktik terbaik untuk mencegah korupsi

Tidak menggantikan saluran pengaduan yang telah ada

Peningkatan proses bisnis dan sistem penunjang platform

User centric – penggunaan *data analytics* untuk mendapatkan pengalaman pengguna yang lebik baik

Data lebih banyak dan *up to date*

Fitur diskusi – masyarakat menemukan dan menyebarkan cara mencegah korupsi versi mereka

JAGA PENDIDIKAN

JAGA KESEHATAN

JAGA DESA

JAGA PERIZINAN

OUTPUT

REGULASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Kebutuhan mendesak untuk mewajibkan pendidikan antikorupsi di seluruh jenjang pendidikan

IMPLEMENTASI PAK

Seluruh jenjang Pendidikan

TATA KELOLA

Mewujudkan sekolah sebagai sarana ideal pembelajaran

KOMITMEN PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTIKORUPSI

KAMI, PEMBUAT KEBIJAKAN, PELAKSANA KEBIJAKAN, PENYELENGGARA PENDIDIKAN, DAN SEGENAP PEMANGKU KEPENTINGAN DUNIA PENDIDIKAN INDONESIA, BERSAMA INI MENYATAKAN BAHWA:

1. Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi merupakan langkah pencegahan yang penting dalam membangun generasi berintegritas untuk memerangi korupsi yang sudah mengakar dalam setiap aspek kehidupan bangsa Indonesia.
2. Sepakat untuk bersama-sama menjalankan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta mewujudkan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik untuk mendukung tumbuh kembangnya integritas yang ideal di lingkungan pendidikan.
3. Sepakat untuk bersama-sama dan segera melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk segera mengimplementasikan Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang bersih dan baik.

Jakarta, 11 Desember 2018

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Menteri Agama
Menteri Dalam Negeri	Pimpinan KPK	